“Rapat Koordinasi Teknis Kewilayahan”

PEMERINTAH KOTA MALANG
BARENLITBANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
JL. TUGU NOMOR 1 MALANG 65119 TEL. 0341 - 366922 FAX. 0341 - 328771

MALANG, 29 OKTOBER 2019

G VISI MISI KOTA

“Bermartabat merujuk pada sebuah nilai harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan”

VISI 2019-2023 KOTA MALANG BERMARTABAT

MISI 1
MENJAMIN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN LAYANAN DASAR LAINNYA BAGI SEMUA WARGA

MISI 2
MEWUJUDKAN KOTA PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI KREATIF, KEBERLANJUTAN DAN KETERPADUAN

MISI 3
MEWUJUDKAN KOTA YANG RUKUN DAN TOLERAN BERAZASKAN KEBERAGAMAN DAN KEBERPIHAKAN TERHADAP MASYARAKAT RENTAN DAN GENDER

MISI 4
MEMASTIKAN KEPUASAN MASYARAKAT ATAS LAYANAN PEMERINTAH YANG TERTIB HUKUM, PROFESIONAL DAN AKUNTABEL

13 INDIKATOR

VISI 2019 2023 KOTA MALANG BERMARTABAT

"Bermartabat merujuk pada sebuah nilai harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan"

KECAMATAN

MISI 2

MEWUJUDKAN KOTA PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI KREATIF, KEBERLANJUTAN DAN KETERPADUAN

MISI 3

MEWUJUDKAN KOTA YANG RUKUN DAN TOLERAN BERAZASKAN KEBERAGAMAN DAN KEBERPIHAKAN TERHADAP MASYARAKAT RENTAN DAN GENDER

MISI 4

MEMASTIKAN KEPUASAN MASYARAKAT ATAS LAYANAN PEMERINTAH YANG TERTIB HUKUM, PROFESIONAL DAN AKUNTABEL

TUJUAN

Terwujudnya Produktifitas dan Daya Saing Daerah yang merata dan berkelanjutan

INDIKATOR

Pertumbuhan ekonomi

Gini Ratio

MISI 2

SASARAN

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

INDIKATOR

% Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu

INDIKATOR

IKLI (Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur)

Meningkatnya Kualitas kemanfaatan tata ruang dan Lingkungan Hidup

INDIKATOR

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)

OPD LEADING

- DINAS PERINDUSTRIAN
- DINAS PERDAGANGAN
- DINAS TENAGA KERJA
- DINAS KOPERASI DAN UM
- DINAS BUDPAR
- DPMPTSP
- DINAS PUPR
- DINAS PERKIM
- DISHUB
- KECAMATAN
- DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- DINAS PUPR
- DINAS PERKIM

TUJUAN

Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender

INDIKATOR

Angka Kemiskinan

MISI 3

SASARAN

Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial

INDIKATOR

Persentase penurunan PMKS

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas

INDIKATOR

Indeks Pembangunan Masy (IPMas); Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Meningkatnya Stabilitas Lingkungan Sosial

INDIKATOR

Indeks Modal Sosial

OPD LEADING

- DINAS SOSIAL
- DINAS TENAGA KERJA
- DP3AP2KB
- DP3AP2KB
- KECAMATAN
- BAGIAN KESRA
- DINAS SOSIAL
- BAKESBANGPOL
- BPBD
- SATPOL PP

TUJUAN

Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

INDIKATOR

Indeks Reformasi Birokrasi

MISI 4

SASARAN

Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum

INDIKATOR

% perda yang ditegakkan

Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif

INDIKATOR

Nilai SAKIP
Opini BPK
Maturitas SPIP
Rasio PAD

Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN

INDIKATOR

Indeks Profesionalitas ASN

Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi

INDIKATOR

Indeks kematangan SPBE

OPD LEADING

- SATPOL PP
- SEKRETARIAT DAERAH
- BPKAD
- INSPEKTORAT
- BARENLITBANG
- SEKRETARIAT DAERAH
- DPMPTSP
- BPPD
- DINAS PERPUS DAN ARSIP
- SEKRETARIAT DPRD
- DISPENDUKCAPIL
- KECAMATAN
- DISHUB
- SELURUH OPD
- BKD
- SEKRETARIAT DAERAH
- SATPOL PP
- DINAS KOMINFO
- DPMPTSP
- DISPENDUKCAPIL

Prioritas MISI 1

Sumber:

Janji Politik
Buku Sedekah Kebijakan Walikota
Pidato Visi-Misi Paripurna DPRD

PRIORITAS PENDIDIKAN:

1. Pendidikan Kharakter sejak Usia Dini;
2. GRAB → Gratis Belajar 12 tahun bagi siswa tidak mampu;
3. Beasiswa Perguruan Tinggi untuk Pelajar (Warga Malang) yang berprestasi;
4. Kualitas tenaga pendidik unggul dengan Uji Kompetensi Guru >75;
5. Kualitas dan Kesejahteraan Guru (Tunjangan Guru, Kepsek, dan tenaga pendidik berbasis kinerja);
6. Rotasi Guru dan Kepsek dalam rangka pemerataan kualitas Pendidikan;
7. Upgrade Sarana Pendidikan;

PRIORITAS KESEHATAN:

1. Universal Health Coverage (UHG) - 100% Warga Kota Malang mendapat BPJS, warga tidak mampu ditanggung Pemkot;
2. Upgrade Kualitas Layanan Puskesmas;
3. Unit Layanan Kesehatan 24 Jam, lengkap dengan dokter jaga dan perawat di setiap kelurahan;
4. JAMPERSAL 1 Juta Rupiah;
5. Ambulan Gratis tiap Kelurahan, penambahan 100 armada dengan waktu tunggu 15 menit;
6. Prefentif dan Promotif Kesehatan masyarakat dan kualitas hidup pasien terminal melalui peran aktif dokter keluarga;

PRIORITAS LAYANAN DASAR LAINNYA:

1. Menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui operasi pasar;
2. Menjamin ketersediaan dan diversifikasi pangan;
3. Kemudahan akses perumahan bagi warga kelas menengah;
4. Subsidi bahan pangan bagi warga miskin desil 1 dengan target konsumsi daging 1,5 kg/bulan/anak;
5. Keberpihakan belanja ASN kepada pasar tradisional;

Prioritas MISI 2

Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan

PRIORITAS EKONOMI:

1. Centra UMKM dan Ekonomi Kreatif (pemanfaatan ex-Ramayana dan ex-PDAM);
2. Revitalisasi pasar tradisional dan pasar modern berbasis pasar rakyat;
3. Memperbaiki sistem kelembagaan BUMD (finansial, pengawasan);
4. Menciptakan ekosistem kolaborasi dan kewirausahaan baru serta Penyediaan *co-working space* di 5 kecamatan;
5. Wisata Kreatif dan Wisata Halal: Wsata Haritage, Kampung Arema, Studio Trans, Museum al'Quran, Mall UMKM;

PRIORITAS TATA RUANG:

1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru;
2. Membentuk fungsi polisi tata ruang;
3. Pengembangan pola ruang perbatasan atar wilayah;
4. Penyederhadaan dan Perbaikan mekanisme perijinan;

PRIORITAS INFRASTRUKTUR DAN SARPRAS:

1. Jalan lingkar luar Kota Malang;
2. Pengembangan sekitar Pintu Tol;
3. Kerjasama Malang Raya pengelolaan Sungai, dan Air Minum;
4. Percepatan rekayasa lalu lintas penanggulangan macet (Zero Macet);
5. Revitalisasi sistem drainasi untuk mengurangi banjir (Zero Banjir);
6. Sarana dan prasaran Kota yang ramah dan nyaman (Trotoar, Taman dan Jembatan);
7. Pengelolaan Kawasan pemukiman Daerah Aliran Sungai (Bedah Kampung-rumah, jalan, gang, saluran air, dll;
8. Integrasi sistem Angkutan Dalam Kota Malang;

PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP:

1. Pengelolaan dan Pemanfaatan sampah terpadu (zero waste) ;
2. Integrasi PAM dan PAL atas kebutuhan air dan pengelolaan limbah;
3. Pengeloaan IPAL di bangunan pemerintah, swasta dan rumah tangga berbasis komunal;
4. Pengelolaan polusi karbon kedaraan bermotor (zero carbon)

Sumber:

Janji Politik
Buku Sedekah Kebijakan Walikota
Pidato Visi-Misi Paripurna DPRD

Prioritas MISI 3

Mewujudkan Kota Yang Rukun dan Toleran berasaskan Keberagaman Dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender

Sumber:
Janji Politik
Buku Sedekah Kebijakan Walikota
Pidato Visi-Misi Paripurna DPRD

PRIORITAS PERLINDUNGAN SOSIAL:

1. Membangun Sarana Prasarana Sosial yang ramah terhadap penyandang difabel;
2. Pembangunan panti jompo terpadi berkonsep villa lansia diwilayah malang timur;
3. Membangun sistem distribusi bantuan social darurat;
4. Membangun sistem informasi penghubung warga yang ingin membantu anak kurang mampu dan berkebutuhan khusus;
5. Membina dan Memberdayakan PMKS untuk lebih produktif;
6. Penetertiban peredaran minuman berakohol dan tempat hiburan;

PRIORITAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:

1. RTH ramah perempuan dan anak;
2. Membangun sistem informasi pelaporan, pelacakan dan penindakan kasus kekerasan perempuan dan akan;
3. Penyiapan keluarga muda baru dengan konsep sekolah ibu;

PRIORITAS LINGKUNGAN DAN BUDAYA:

1. Pengembangan sistem pengamanan lingkungan dengan e-siskampling;
2. Membangun event-event kebudayaan yang mendidik sebagai salah satu destinasi wisata;
3. Penguatan forum dan peran tokoh-tokoh agama dan masyarakat;

PRIORITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKT DAN KOMUNITAS:

1. Menyusun kalender event-event pemberdayaan komunitas sebagai destinasi edukasi dan wisata;
2. Pengembangan Kawasan pemberdayaan thematik;

Prioritas MISI 4

PRIORITAS HUKUM:

1. Penyesaian sengketa hukum;
2. Harmonisasi Properda dengan Kebutuhan Pembangunan;
3. Sistem Pengaduan Pelanggaran Hukum

PRIORITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN:

1. Struktur kelembagaan yang ramping dan tepat fungsi;
2. Penyempurnaan sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan;
3. Pengembangan sistem layanan public yang cepat, mudah dan terintegrasi;
4. Penertiban pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
5. Pengelolaan sistem manajemen Aset untuk produktifitas;
6. Pengelolaan sistem keuangan yang bebas KKN dan Transparan;
7. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah;

PRIORITAS MANAJEMEN APARATUR:

1. Mengembangan sistem reward dan punishment kinerja aparatur;
2. Mambangun standar kompetensi dan dan peta kebutuhan kepegawaian secara professional;
3. Menjalankan talent poll untuk menyediakan kebutuhan jabatan structural yang professional;
4. Membangun budaya kerja yang berintegritas dan jiwa kepemimpinan yang tangguh;

PRIORITAS TEKNOLOGI INFORMASI:

1. Membangun sistem respon cepat dan monitoring pembangunan;
2. Membangun Big Data dan Pola pemanfatan secara Geo Spasial;
3. Mengintegrasikan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi;

Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah

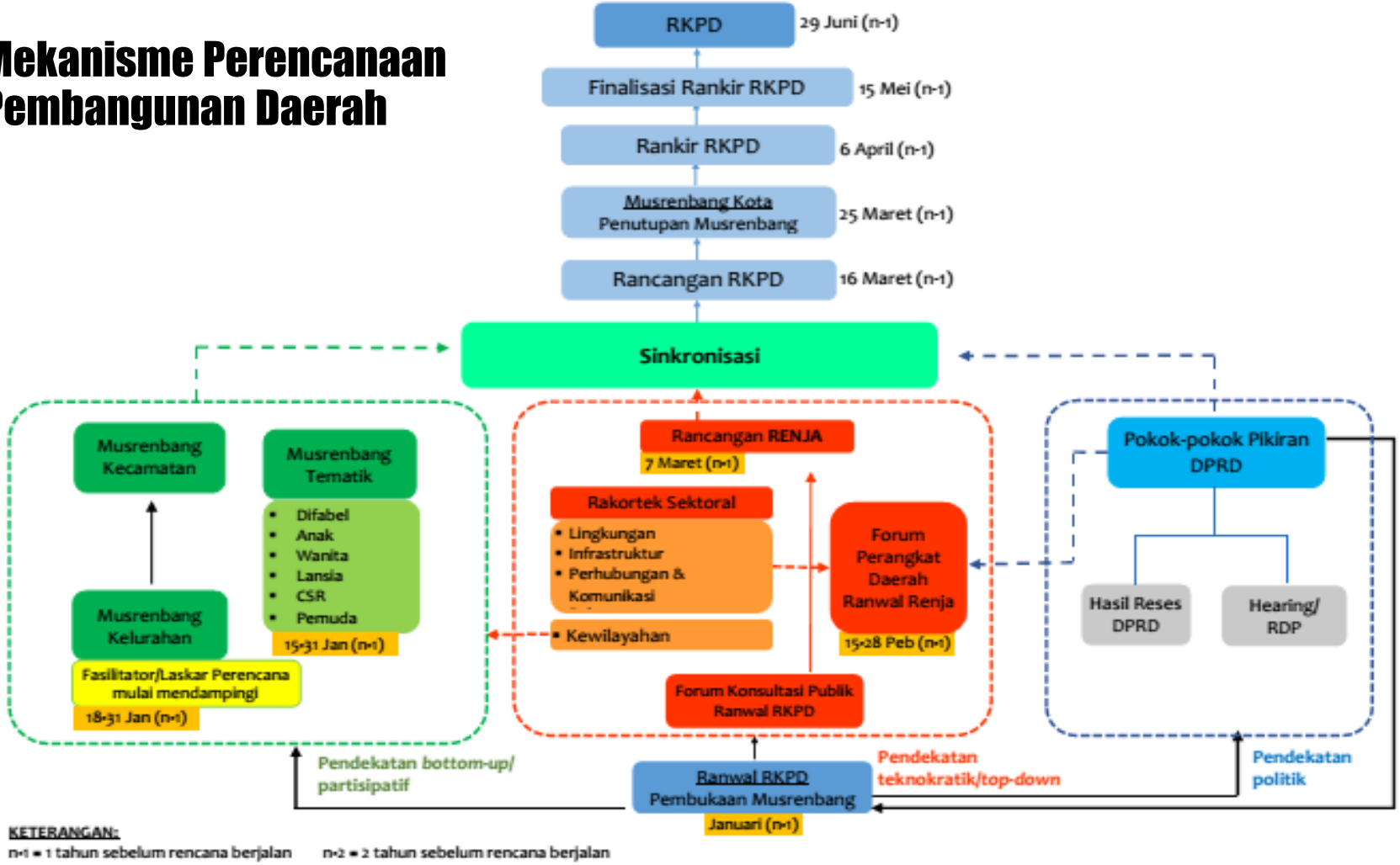

SINKRONISASI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN

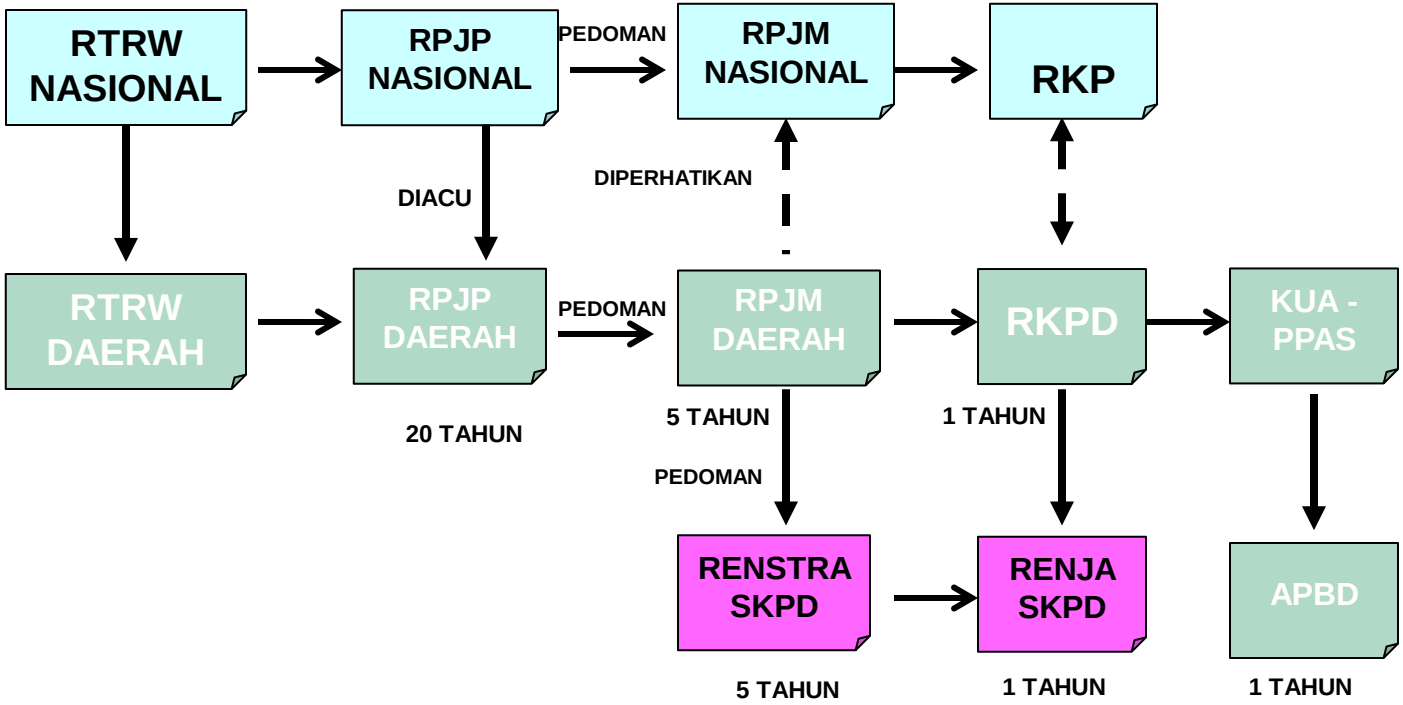

Hubungan Rakortek dengan RKPD

Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) merupakan rapat koordinasi sektoral untuk membahas sub tema yang menjadi isu strategis yang disesuaikan dengan tema perencanaan pembangunan daerah tahunan yang tertuang dalam RPJMD dalam upaya mengatasi isu strategis/permasalahan dimaksud.

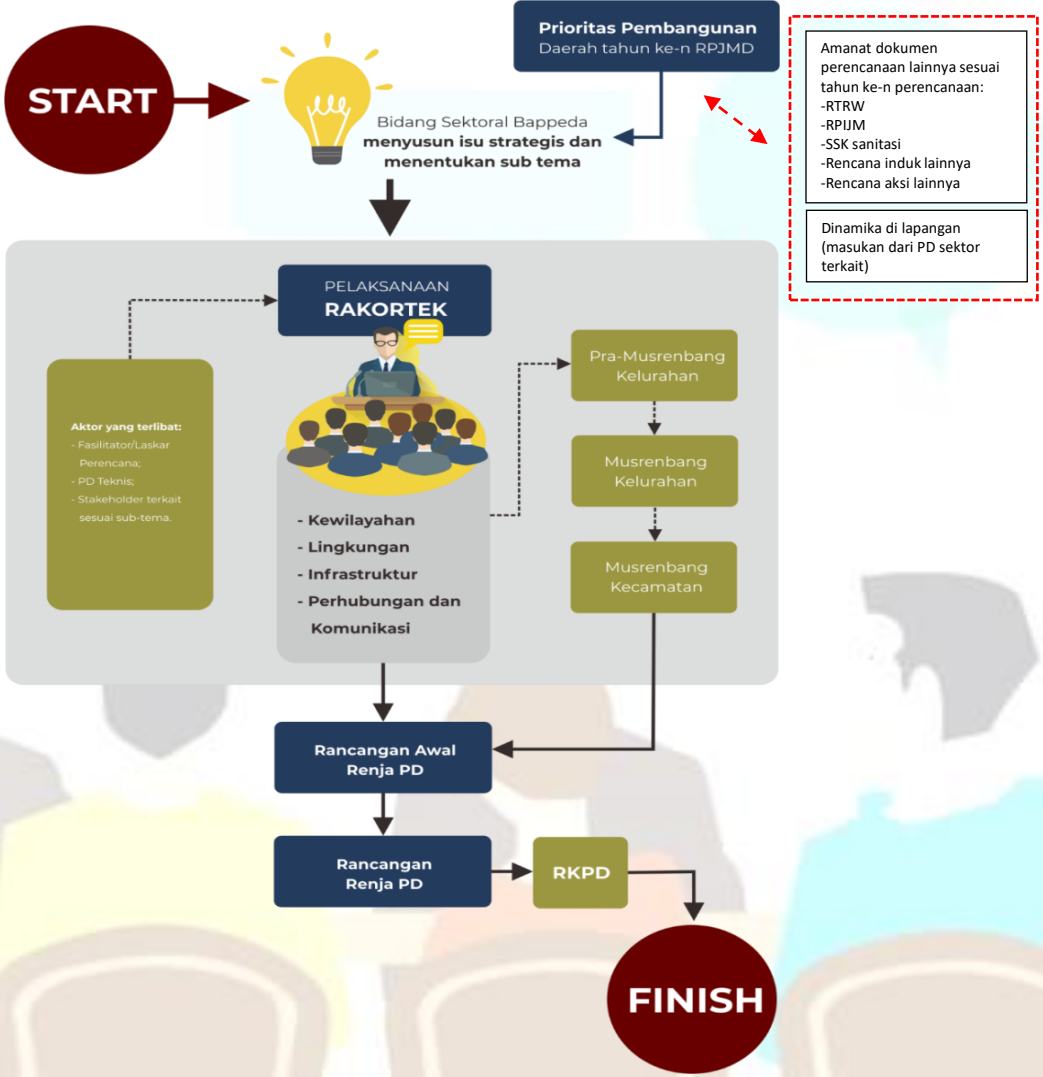

Arah Kebijakan 5 Tahunan

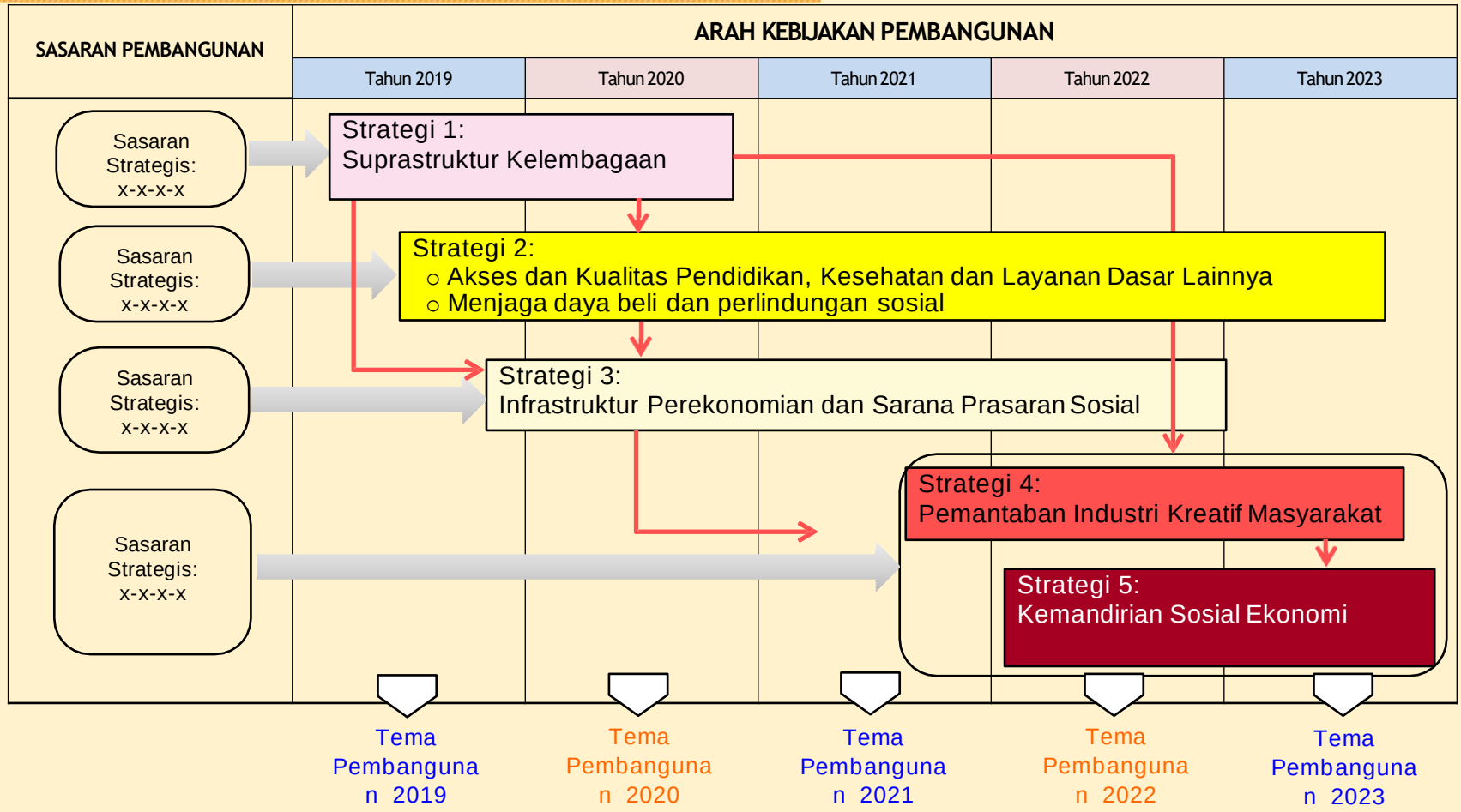

Matriks Program pada RPJMD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
	Keuangan	keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu														Perwakilan Rakyat Daerah
		Persentase Promperda yang menjadi Perda	N/A		0	57%		133%		100%		100%		100%		
	Program Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi penyusunan Perda	N/A		0	100%	34.000.000.000	100%	34.750.000.000	100%	35.000.000.000	100%	35.500.000.000	100%	139.250.000.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Penyelenggaraan Kehumasan	Persentase publikasi kegiatan DPRD	N/A		0	75%	1.000.000.000	85%	1.100.000.000	90%	1.200.000.000	100%	1.300.000.000	100%	4.600.000.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Pemerintahan Administrasi Kecamatan															
	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum				47.384.208.000		-		0		-		-		47.384.208.000	Kecamatan/Kelurahan
	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kesellayahan	N/A		40.583.108.200	0,35	29.571.548.000	0,4	34.373.088.000	0,45	38.372.873.000	0,48	44.306.940.000	0,48	187.307.557.200	Kecamatan/Kelurahan
		Persentase usulan masyarakat untk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	N/A			3,89		4,04		4,19		4,34		4,34		
	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan dan ormas di wilayah kecamatan dan kelurahan yang aktif	N/A		16.325.597.300		-		0		-		-		16.325.597.300	Kecamatan/Kelurahan
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	N/A		0	4,18	61.000.000.000	4,26	61.500.000.000	4,34	63.000.000.000	4,42	64.500.000.000	4,42	250.000.000.000	Kecamatan/Kelurahan
		Rasio Linmas per RT	N/A			0,65		0,75		0,85		1		1		
	Program Pemerintahan Umum	IKM Perangkat Daerah	N/A		0	80,1	21.600.000.000	80,2	22.600.000.000	80,3	23.600.000.000	80,4	24.600.000.000	80,4	92.400.000.000	Kecamatan/Kelurahan

2018-2023

No.	Program	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum					
2.	Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik					
3.	Pemberdayaan Masyarakat					
4.	Pemerintahan Umum					
5.	Kesekretariatan					

Indikator Kinerja Utama

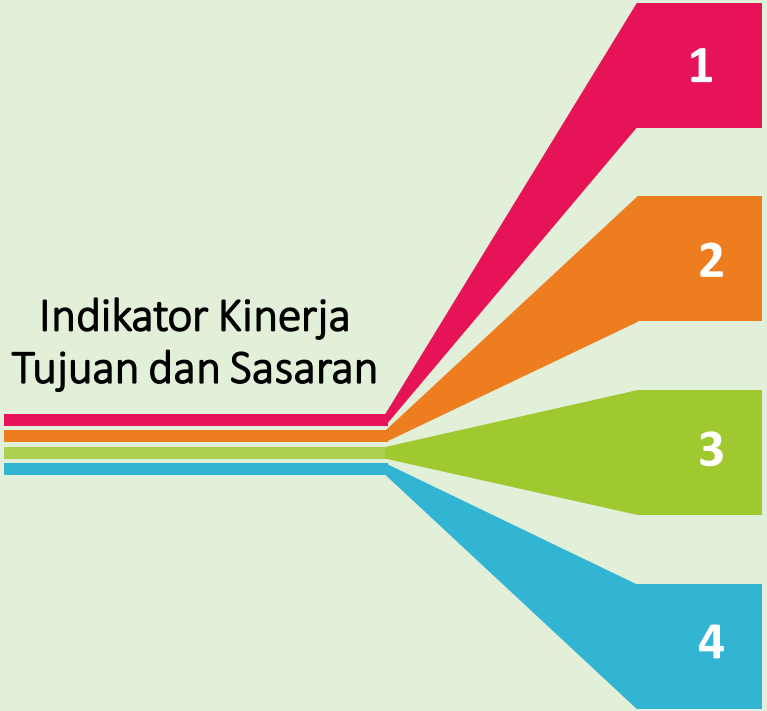

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah
2. Nilai Sakip OPD
3. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan
4. Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik

Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU)

NO	INDIKATOR
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah
2	Nilai Sakip OPD
3	Prosentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu
4	Tingkat Publikasi informasi
5	Persentase Peningkatan Pelayanan administrasi Kecamatan
6	Persentase peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan Kecamatan
7	IKM Perangkat Daerah
8	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan
9	Persentase lembaga kemasyarakatan dan ormas di wilayah kecamatan dan kelurahan yang aktif
10	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (---> mendukung indeks gotong royong dan toleransi)
11	Rasio Linmas per RT (--> mendukung indeks rasa aman--> data kota 0,5---> target kota 2023 --> rasio 1)
12	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik
13	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
14	Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir
15	Persentase penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
16	Persentase pelaksanaan monev pembangunan prasarana dan sarana di wilayah kecamatan

Program Pemberdayaan Masyarakat

KECAMATAN

KEGIATAN	INDIKATOR
• Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan	• Jumlah monitoring peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kecamatan
• Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kecamatan	• Jumlah lembaga kemasyarakatan terfasilitasi
• Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	• Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan
• Pembinaan dan Fasilitasi Forum-Forum atau Koordinasi Tingkat Kecamatan	• Jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi forum-forum atau koordinasi tingkat kecamatan
• Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan	• Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang
• Penyusunan Profil Kecamatan	• Jumlah dokumen profil

Program Pemberdayaan Masyarakat

KELURAHAN

KEGIATAN	INDIKATOR
• Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan	• Jumlah monitoring peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan
• Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan	• Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi
• Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	• Jumlah kegiatan
• Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan	• Jumlah kegiatan
• Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan	• Jumlah dokumen hasil musrenbangkel
• Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan	• Jumlah kegiatan
• Penyusunan Profil Kelurahan	• Jumlah dokumen profil
• Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan	• Jumlah modin dan perawat jenasah
• Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan	• Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam
• Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan	• Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu

Lelang Kinerja

SASARAN DAERAH : Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan
INDIKATOR KINERJA : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)
PERANGKAT DAERAH : **Kecamatan KEDUNGKANDANG**
STATUS OPD : OPD ~~UTAMA~~/PENDUKUN[redacted]
Catatan

OPD Utama : OPD yang merupakan turunan/casdcading langsung dari faktor pembentuk Sasaran Daerah
OPD Pendukung : OPD yang merupakan bukan turunan/casdcading langsung dari faktor pembentuk Sasaran Daerah

LELANG KINERJA				
INDIKATOR KINERJA			Data Awal	2019
Cascading Langsung/ Faktor Pembentuk	:	SKM pelayanan Prasarana dan Sarana publik di wilayah kecamatan	Data tidak tersedia	
		persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah kecamatan yang diakomodir	35%	40%
		persentase pelaksanaan peningkatan sarana prasarana kewilayahan (kegiatan sarpras kewilayahan dibanding dengan rencana kegiatan sarpras kewilayahan)	Data tidak tersedia	
		PRIORITAS WALIKOTA	Program / Kegiatan	
Logframe Walikota			Program : Peningkatan Sarana dan Prasar	

Belum ada dokumen

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN PUBLIK

KEGIATAN	INDIKATOR
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Publik di wilayah Kecamatan	Jumlah Monev Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan
Penyusunan Rencana Pembangunan Prasarana dan Publik	Dokumen database kondisi Sarpras di wilayah Kecamatan (dan prioritas pelaksanaan pembangunan sapras)
Peningkatan Prasarana dan Publik Kelurahan	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan

Review Hasil Musrenbang 2018 yang diakomodir pada

APBD 2019

barenlitbang.malangkota.go.id

barenlitbang kota malang

barenlitbangkotamalang

Dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan daerah Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat

MUSRENBANG tahun n-1

Hasil Partisipasi Masyarakat menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah

RAPBD

RKPD

USULAN MUSRENBANG YANG DIAKOMODIR

Penetapan APBD tahun n

PUBLIKASI

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pengawasan

USULAN MUSRENBANG

KELURAHAN

FISIK/KONTRUKSI

NON FISIK/NON KONSTRUKSI

KECAMATAN

PELAKSANA

KELURAHAN PERANGKAT DAERAH

TINGKAT KOTA

APBD (DPA)

ATURAN TERKAIT PENGGUNA DANA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2018

(Saat ini pembahasan ranperwal pengganti)

DANA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

PERATURAN TERKAIT PENGANGGARAN PERUNTURAN (PROGRAM DAN KEGIATAN), PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

1. Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum
2. Program Pemberdayaan Masyarakat
3. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik melalui kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Pelaksanaan program diatas terutama Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Musrenbangkel yang belum dipenuhi melalui anggaran belanja Perangkat Daerah lain

Resume hasil Musrenbang 2018 untuk RKPD 2019

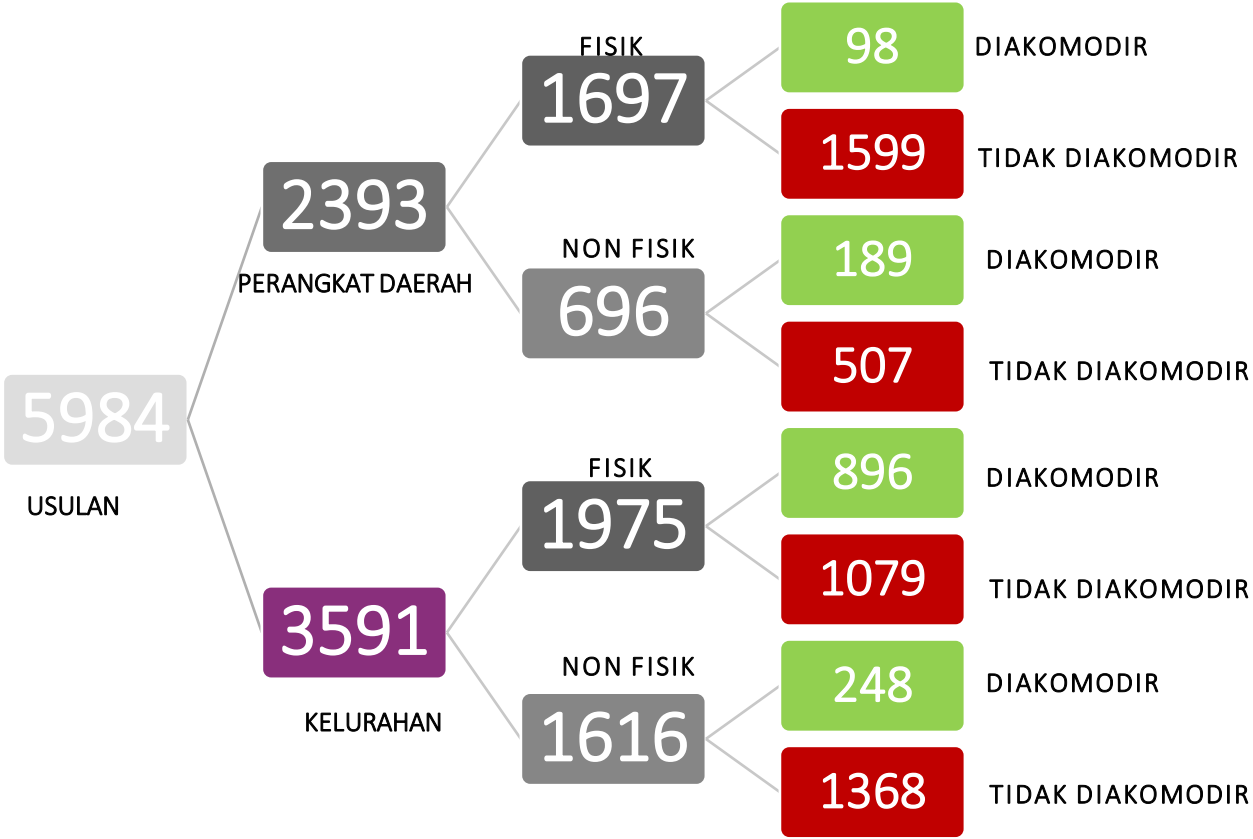

Resume hasil Musrenbang 2018 untuk RKPD 2019

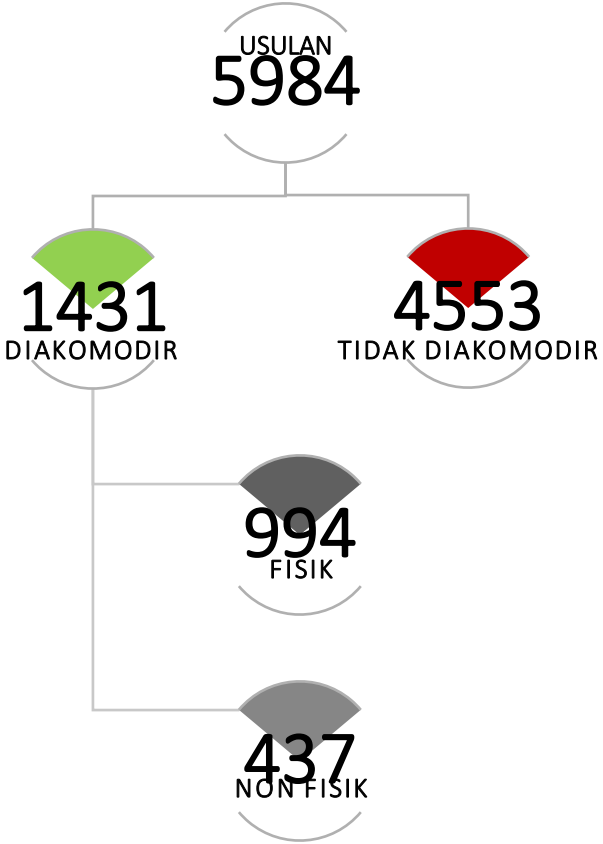

USULAN MUSRENBANG

JUMLAH USULAN

5984 kegiatan dengan usulan pagu anggaran sebesar Rp. 834.512.257.671

Yang diakomodir PD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang adalah sebesar **24%** yaitu 1431 kegiatan dengan Pagu anggaran sebesar Rp.106.597.686.360,00 dengan rincian sebagai berikut :

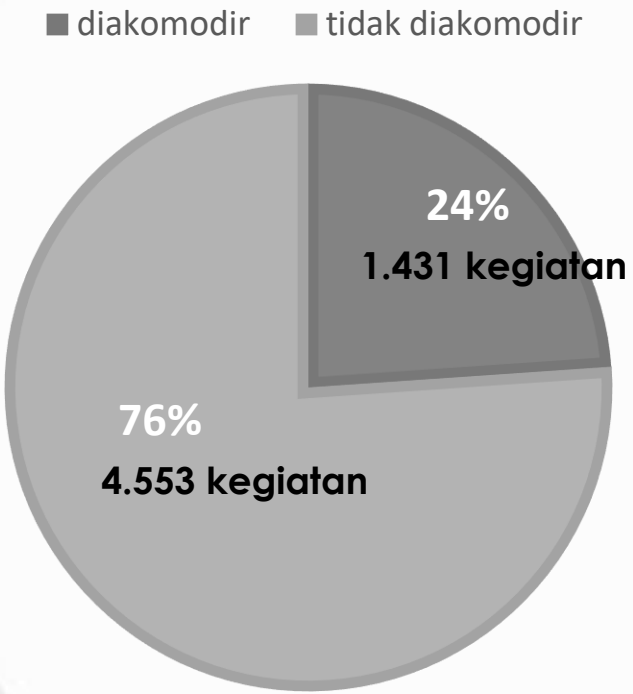

KOMPOSISI USULAN MUSRENBANG YANG DIAKOMODIR

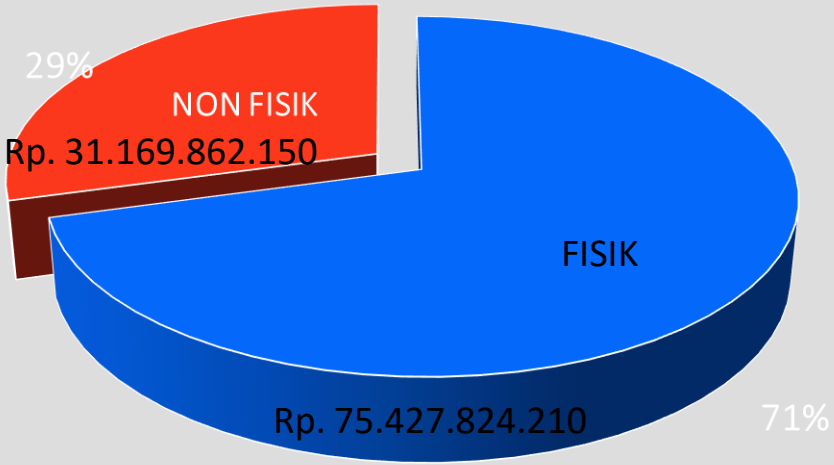

Kegiatan Fisik :

a. Jumlah Kegiatan : 994 kegiatan
b. Pagu Anggaran : Rp. 75.427.824.210,00

Kegiatan Non Fisik :

a. Jumlah Kegiatan : 437 kegiatan
b. Pagu Anggaran : Rp. 31.169.862.150,00

Usulan Kegiatan

Jumlah usulan kegiatan Musrenbang yang diakomodir pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 20

2018

Usulan kegiatan yang diakomodir :
953 kegiatan (13%) dengan Pagu
Rp. 66.519.308.948,00

2019

Usulan kegiatan yang diakomodir :
1431 kegiatan (24%) dengan Pagu
Rp. 106.597.686.360,00

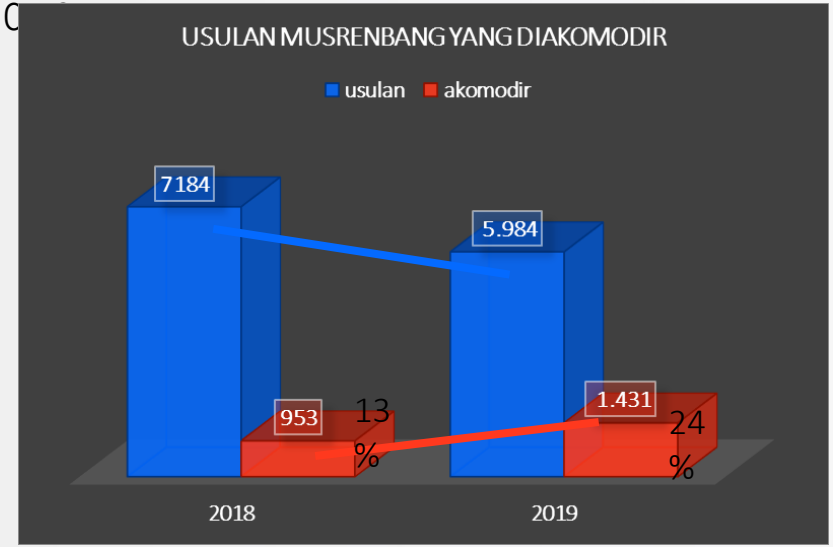

Usulan yang diteruskan ke Perangkat Daerah

JUMLAH USULAN

Fisik/Konstruksi :

Jumlah Usulan Kegiatan : **1697** Kegiatan

Pagu Anggaran : Rp. 654.607.677.961

Non Fisik/Non Konstruksi :

Jumlah Usulan Kegiatan : **696** Kegiatan

Pagu Anggaran : Rp. 89.326.980.844,00

Total Usulan :

Jumlah Kegiatan : 2393 Kegiatan

Anggaran : Rp. 743.934.658.805

Jumlah Usulan Kegiatan pada Perangkat Daerah

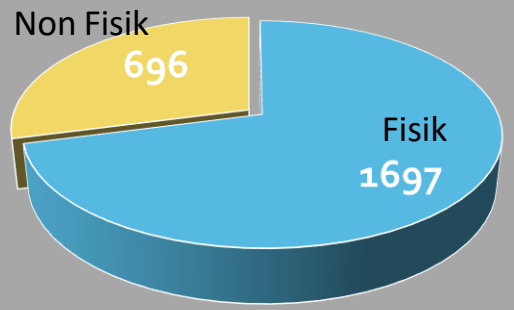

Persentase Pagu Anggaran pada Usulan Musrenbang

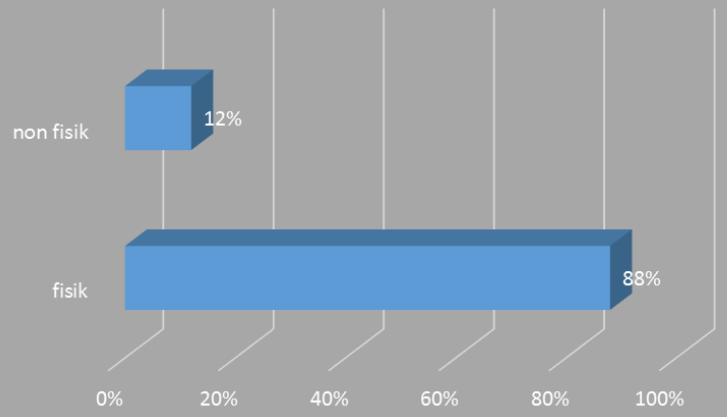

Usulan yang dilaksanakan Kelurahan

JUMLAH USULAN

Fisik/Konstruksi :
Jumlah Usulan Kegiatan : 1975 Kegiatan
Pagu Anggaran : Rp. 70.737.247.848

Non Fisik/Non Konstruksi :
Jumlah Usulan Kegiatan : 1616 Kegiatan
Pagu Anggaran : Rp. 19.840.351.018

Total Usulan :
Jumlah Kegiatan : 3591 Kegiatan
Anggaran : Rp. 90.577.598.866

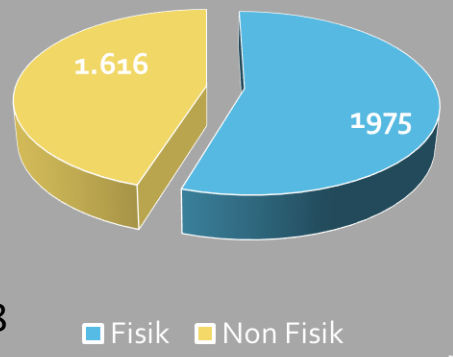

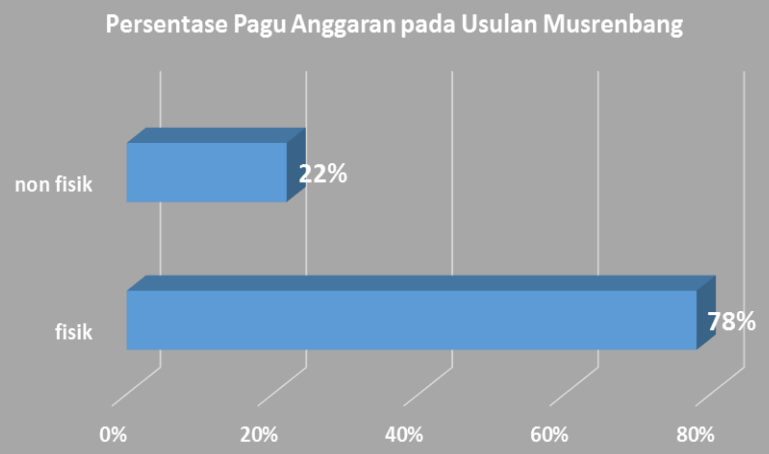

Usulan yang diakomodir Perangkat Daerah

Fisik/Konstruksi :
Jumlah Usulan Kegiatan : 98 Kegiatan
Pagu Anggaran : Rp. 45.462.530.560

Non Fisik/Non Konstruksi :
Jumlah Usulan Kegiatan : 189 Kegiatan
Pagu Anggaran : Rp. 24.624.554.650

Total Usulan yang diakomodir :
Jumlah Kegiatan : 287 Kegiatan
Anggaran : Rp. 70.087.085.210

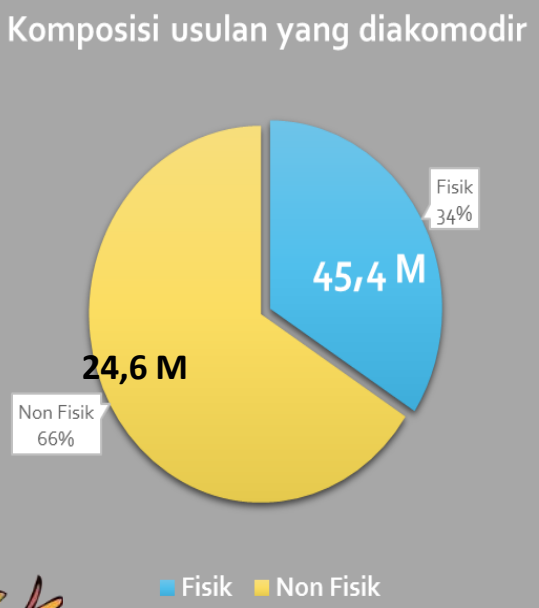

Perangkat Daerah

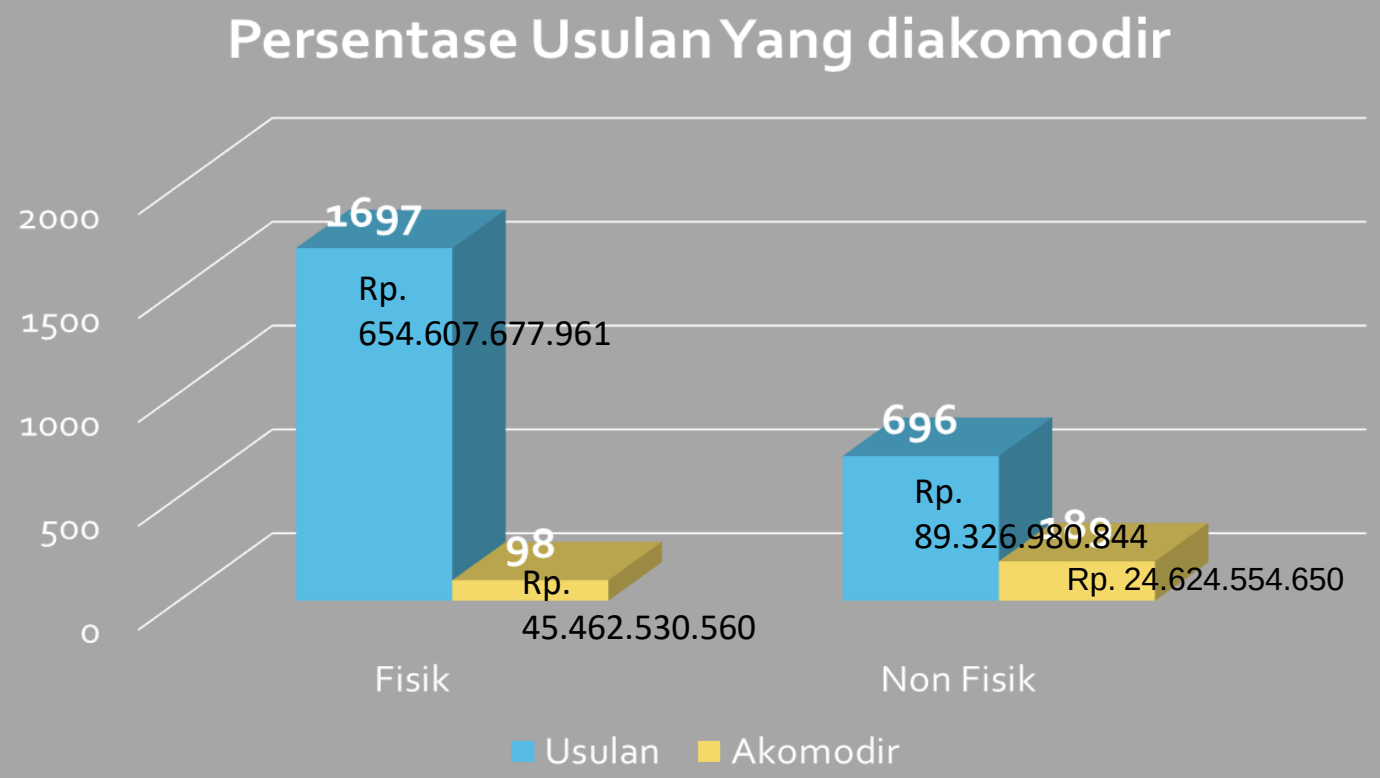

Perangkat Daerah

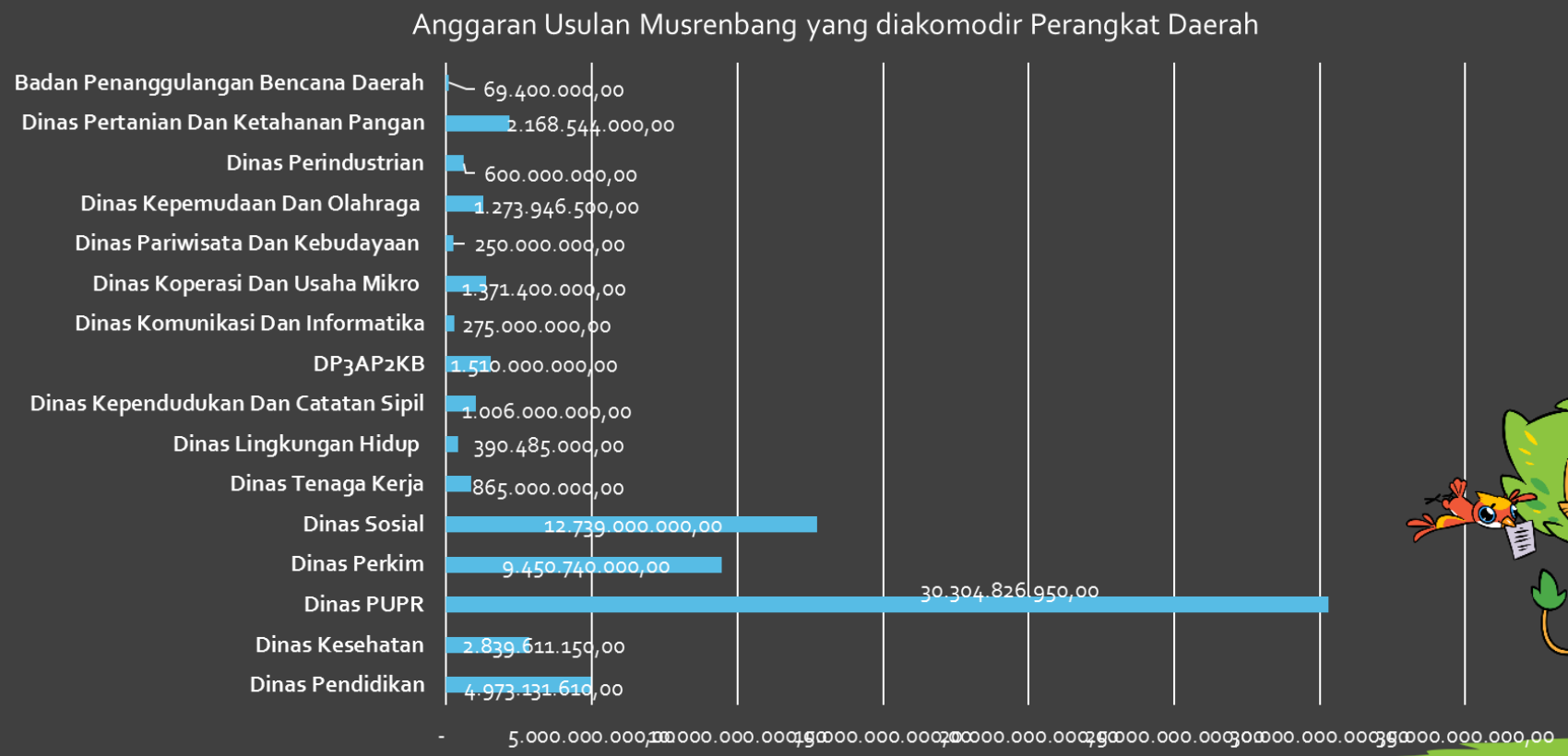

Usulan yang diakomodir Kelurahan

Fisik/Konstruksi :
Jumlah Usulan Kegiatan : 896 Kegiatan
Pagu Anggaran : Rp. 29.965.293.650

Non Fisik/Non Konstruksi :
Jumlah Usulan Kegiatan : 248 Kegiatan
Pagu Anggaran : Rp. 6.545.307.500

Total Usulan yang diakomodir :
Jumlah Kegiatan : 1144 Kegiatan
Anggaran : Rp. 36.510.601.150

KOMPOSISI USULAN YANG DIAKOMODIR

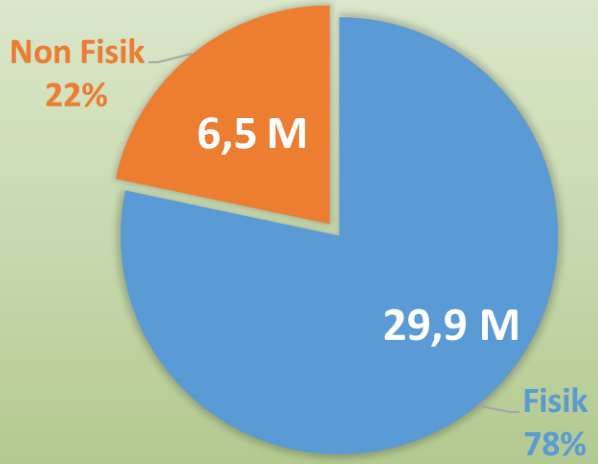

KECAMATAN

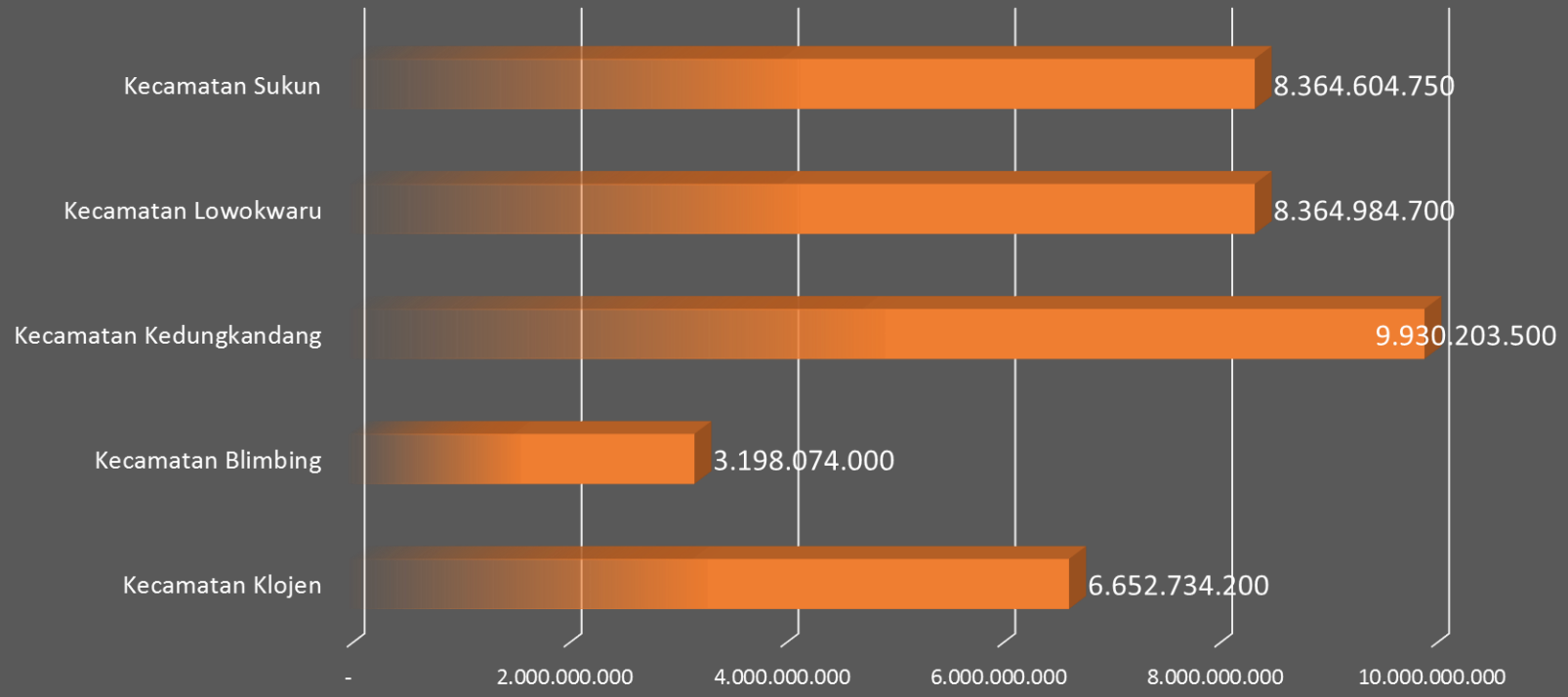
Kecamatan Sukun
8.364.604.750
Kecamatan Lowokwaru
8.364.984.700
Kecamatan Kedungkandang
9.930.203.500
Kecamatan Blimbing
3.198.074.000
Kecamatan Klojen
6.652.734.200
-
2.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000

KECAMATAN

KOMPOSISI USULAN MUSRENBANG YANG DIAKOMODIR

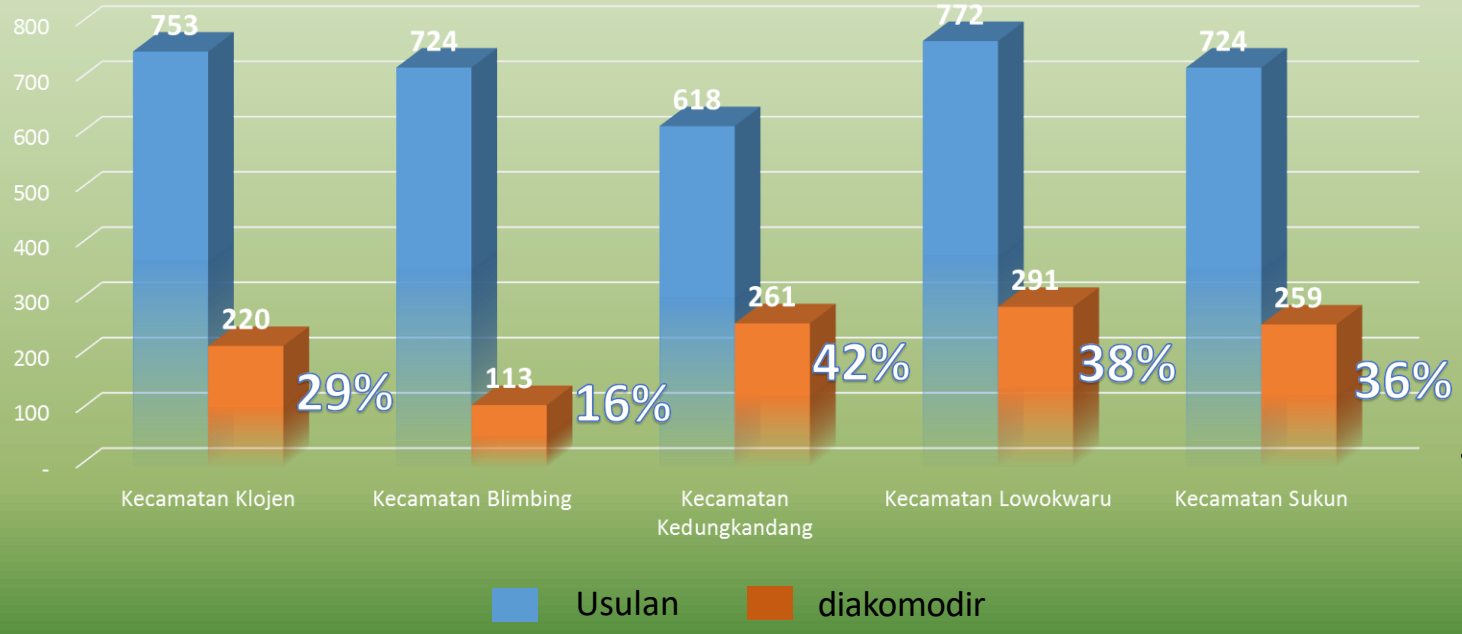

bahan diskusi

Isu strategis/ permasa-lahan

- Jalan
- Drainase
- Sanitasi
- ruang terbuka hijau
- penerangan jalan
- lain-lain
- pemerintahan umum
- pemberdayaan masyarakat
- keamanan ketentraman, dan ketertiban

prioritas & sinergi penangan-an

- Lintas batas
- Dampak lebih besar
- Arah kebijakan 2021

lain-lain

bahan diskusi

		Waktu diskusi 60 menit
KELOMPOK 1 : Klojen-Kedungkandang 2 : Blimbing-Lowokwaru-Sukun	Identifikasi isu dan permasalahan di wilayah (fisik – non fisik)	Presentasi 2 kelompok x 15 menit : 10 menit paparan 5 menit tanggapan (vice versa)
Masing-masing kelompok : bentuk Ketua, Notulis, dan Presenter	Identifikasi ▪ Lintas batas ▪ Dampak lebih besar	